

BAB II

TINJAUAN KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain yaitu:

1. Penelitian Pertama

ProKus: Program Kewirausahaan Sosial oleh Hari Harjanto Setiawan, dkk dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan program yang cukup singkat sekitar 3 - 4 bulan dan pendampingan secara informal setelah program ini selesai, Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) ini dapat menaikkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun baru mengembalikan kondisi pendapatan semula pada saat sebelum pandemi covid-19 terjadi.

2. Penelitian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat oleh Yayasan Kuntum Indonesia melalui Kewirausahaan Sosial Kampong Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) Bogor oleh Lisma Dyawati Fuaida dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Yayasan KUNTUM Indonesia memberdayakan masyarakat melalui kewirausahaan sosial di Kampong

Wisata Bisnis Tegalwaru. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Desa Tegalwaru, Bogor, mendapatkan pendidikan kewirausahaan dengan cara aktif terlibat dalam praktik bisnis tertentu sesuai dengan berbagai metode yang telah ditetapkan secara kolektif (Fuaida, 2020). Dalam proses dan hasil dari praktik kewirausahaan sosial, pemberdayaan yang diberikan kepada wirausahawan sosial KWBT mencakup tiga jenis pemberdayaan, yaitu: 1) pemberdayaan ekonomi; 2) pemberdayaan pendidikan; dan 3) pemberdayaan sosial. Melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Tegalwaru oleh Yayasan KUNTUM Indonesia ini, masyarakat setempat dapat berperan secara positif dalam lingkungan sosial mereka.

3. Penelitian Ketiga

Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat oleh Rudi Saprudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, dan Shafa Yuandina dari Universitas Padjajaran tahun 2021. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengilustrasikan peran kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Penulisan ini dilakukan melalui studi literatur dan menggabungkan konsep-konsep utama yang menjadi fokus pembahasan. Selain itu, juga dilakukan pencarian terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat dan peran kewirausahaan sosial. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan sosial memiliki peran aktif dalam proses pembangunan (Yuandina, 2022). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan sosial menyediakan pelatihan kewirausahaan dan membangun jaringan untuk mendapatkan daya ungkit lebih melalui akses ke media mitra yang

mendukung usaha tersebut. Dengan demikian, kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Penelitian Keempat

Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat: Tiga Cerita dari Kutai Timur oleh Denny Riezki Pratama dari PT Kaltim Prima Coal tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang proses kemunculan dan peran agen lokal dalam kewirausahaan sosial dalam konteks program CSR dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kunci program pemberdayaan masyarakat adalah para pelaku wirausaha sosial (Pratama, 2019). Mereka berperan dalam mendorong masyarakat untuk lebih inovatif dan kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan.

5. Penelitian Kelima

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep oleh Ristiana Ristiana dan Amin Yusuf, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES di Desa Wisata Lerep. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 2 pengelola BUMDES, dan terdapat juga 4 anggota BUMDES sebagai informan tambahan. Untuk

memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Sedangkan untuk analisis data, dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES terdiri dari 7 tahap, yaitu: tahap persiapan, pengkajian perencanaan alternatif program atau kegiatan, performalisasi rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi, dan terminasi. Faktor-faktor yang mendorong pemberdayaan ekonomi meliputi sumber daya alam yang melimpah, dukungan dari masyarakat dan pemerintah, serta niat dan semangat dari individu yang diberdayakan. Namun, terdapat juga faktor-faktor penghambat seperti minimnya sumber daya manusia yang memahami BUMDES, anggaran dana yang masih terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya BUMDES.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Nama Pengarang	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	ProKUS: Program Kewirausahaan Sosial oleh Hari Harjanto Setiawan, dkk dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2021	Hasil dari penelitian ini yaitu dengan program yang cukup singkat sekitar 3 - 4 bulan dan pendampingan secara informal setelah program ini selesai, Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) ini dapat menaikkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun baru mengembalikan	1. Terdapat persamaan pada sasaran penelitian yaitu Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial	1. Peneliti meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

		kondisi pendapatan semula pada saat sebelum pandemi covid-19 terjadi.	2. Terdapat persamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif	sedangkan Hari Harjanto Setiawan, dkk meneliti Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Indonesia 2. Fokus dan setting penelitian berbeda.
2.	Pemberdayaan Masyarakat oleh Yayasan Kuntum Indonesia melalui Kewirausahaan Sosial Kampong Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) Bogor oleh Lisma Dyawati Fuaida dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019	Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat di sekitar Desa Tegalwaru Bogor diberikan pendidikan kewirausahaan dengan cara mempraktikkan langsung bisnis tertentu dengan berbagai metode yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama.	1. Terdapat persamaan aspek yaitu aspek pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial. 2. Terdapat persamaan dalam pendekatan yaitu menggunakan pendekatan Kualitatif	3. Peneliti meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) pada KPM PKH sedangkan Lisma Dyawati Fuaida meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat oleh Yayasan Kuntum Indonesia melalui Kewirausahaan Sosial

				Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) Bogor.
3.	Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat oleh Rudi Saprudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, dan Shafa Yuandina dari Universitas Padjajaran tahun 2021	Hasil dari penulisan ini adalah bahwa kegiatan kewirausahaan sosial berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat menghasilkan sebuah pelatihan kewirausahaan dengan membangun jaringan agar mendapat daya ungkit lebih dengan terbukanya akses terhadap media partner yang akan membantu usaha tersebut. Dengan begitu, kewirausahaan dapat dianggap berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Terdapat persamaan dalam aspek yaitu aspek pemberdayaan serta dalam sasaran yaitu Program Kewirausahaan Sosial	2. Peneliti meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) pada KPM PKH sedangkan Rudi Saprudin Darwis meneliti tentang Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat 3. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan Rudi Saprudin Darwis menggunakan pendekatan

				studi literatur
4.	Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat: Tiga Cerita dari Kutai Timur oleh Denny Riezki Pratama dari PT Kaltim Prima Coal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci program pemberdayaan masyarakat adalah para pelaku wirausaha sosial. Sebab, mereka berperan mendorong masyarakat untuk lebih inovatif dan kreatif memanfaatkan peluang pemberdayaan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat persamaan dalam aspek pemberdayaan melalui Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) 2. Terdapat persamaan dalam pendekatan yaitu menggunakan pendekatan Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peneliti meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) pada KPM PKH sedangkan Denny Riezki Pratama meneliti tentang Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat 4. Variabel penelitian peneliti adalah pemberdayaan sedangkan variabel Danny Riezki Pratama adalah peran kewirausahaan sosial

5.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep oleh Ristiana Ristiana dan Amin Yusuf. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan ada 7 tahap yaitu: tahap persiapan, pengkajian perencanaan alternatif program atau kegiatan, performalisasi rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan terminasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat persamaan dalam tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan melalui Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) 2. Terdapat juga persamaan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan di setting yang berbeda
----	---	---	---	---

Berdasarkan hasil analisis matriks diatas, penelitian terdahulu belum ada yang melakukan kajian atau penelitian terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang mencakup tahap perencanaan (*planning*), pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengembangan, penguatan potensi, dan pemeliharaan pada KPM Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. belum terdapat juga penelitian yang membahas tentang Pemberdayaan pada kpm pkh dalam Program Kewirausahaan Sosial khususnya di Kecamatan Soreang

Kabupaten Bandung. Analisis penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam pencarian literatur yang sesuai.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Jim Ife dalam Zubaedi (2013) pemberdayaan dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan serta keterampilan dari masyarakat atau diri individu untuk dapat meningkatkan kemampuan serta taraf hidup suatu kelompok masyarakat atau individu. Selain itu, pemberdayaan membuat seseorang dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

Edi Suharto (2009) mengatakan bahwa pemberdayaan ditujukan kepada kemampuan orang secara umum dan kelompok rentan dan lemah secara khusus seperti fakir miskin, perempuan serta lanjut usia sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya agar mereka dapat bebas mengemukakan pendapat di muka umum, terbebas dari kelaparan, kebodohan, serta terbebas dari segala penyakit. Selain itu, kelompok rentan juga harus mempunyai kemampuan untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan serta memperoleh kebutuhan baik barang atau jasa yang mereka perlukan. Tak hanya itu, kelompok rentan juga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kelompok rentan dapat menggunakan

diskusi dengan pihak terkait untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka selanjutnya.

Inti dari suatu pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan individu atau suatu masyarakat, memperkuat potensi yang ada baik dari dalam diri masyarakat seperti keterampilan yang mereka miliki ataupun potensi dari luar diri masyarakat itu sendiri seperti potensi alam serta terciptanya kemandirian dari masyarakat untuk dapat melakukan pemberdayaan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial mereka (Winarni, 1998). Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pemberdayaan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dalam diri seseorang atau kelompok rentan dengan cara menggali potensi dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

2. Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy dalam Rahman Mulyawan (2016) mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. *Enabling* (pengembangan), diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan serta dapat mengembangkan potensi yang ada baik dari dalam diri atau potensi dari luar diri masyarakat.
- b. *Empowering* (memperkuat potensi), mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial. *Skill* dan

kemampuan manajerial didapatkan melalui pelatihan, seminar atau kegiatan semacamnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.

- c. Memelihara mengacu pada kegiatan pemberdayaan yang berfokus pada perlindungan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang seimbang terhadap potensi masyarakat yang rentan dalam berbagai aspek, sehingga menumbuhkan lingkungan persaingan yang sehat. Selanjutnya, masyarakat harus secara aktif melanjutkan kegiatan pemberdayaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.

3. Proses Pemberdayaan

Secara umum, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu tahap persiapan (mencakup persiapan petugas dan persiapan lapangan), serta tahap assessment (melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia). Selanjutnya tahap perencanaan alternatif program & pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi proses & hasil perubahan dan terakhir tahap terminasi (Adi, 2012).

a. Tahap Persiapan (*Engangement*)

Pada tahap persiapan, terdapat minimal dua tahapan yang harus dilakukan, yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas melibatkan tenaga pemberdaya masyarakat, seperti *community worker*, yang berperan dalam proses pemberdayaan. Sementara itu, penyiapan lapangan menjadi syarat penting keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat, yang pada prinsipnya diarahkan untuk dilakukan secara non-direktif..

b. Tahapan Pengkajian (*Assessment*)

Proses *assesment* yang dilakukan bisa dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-person*), atau melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini, berbagai teknik dapat digunakan untuk melakukan *assessment*, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif..

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan berusaha secara partisipatif melibatkan warga dalam berpikir tentang masalah yang dihadapi dan cara-cara untuk mengatasinya. Dalam usaha untuk mengatasi masalah yang ada, diharapkan masyarakat dapat mempertimbangkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.

Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program kegiatan.

f. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sebagai proses pengawasan dan penilaian dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas tetap harus keluar dari komunitas sasaran secara perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Adapun teori lain yang menjelaskan tentang tahapan pemberdayaan yaitu menurut Soerjono Soekanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019), pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian atau *assessment* dapat dilakukan secara individual lewat kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien. Ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat.

c. Tahap Alternatif Program

Dalam tahapan ini, petugas akan berperan sebagai *exchange agent* atau agen perubahan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif program berikut kelebihan dan kekurangannya. Nantinya, alternatif tersebut dipakai untuk menentukan program yang paling efektif.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap pemfomalisasi, agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memfomalisasi gagasan tersebut ke dalam tulisan, apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap implementasi, masyarakat harus memahami maksud, tujuan dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri.

g. Tahap Terminasi

Pada tahapan terakhir, proyek harus berhenti. Sebab, masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, mereka sudah bisa menjamin kehidupan layak bagi diri sendiri dan keluarga.

Berbagai faktor dan aspek organisasi yang mempengaruhi pemberdayaan oleh anggota masyarakat telah diusulkan oleh Laverack dan Wallerstein dan ditetapkan sebagai *Organizational Domains of Community Empowerment (ODCE)* atau Domain Organisasi Pemberdayaan Masyarakat (Kasmel & Tanggaard, 2011). ODCE menggambarkan kegiatan yang termasuk kedalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut

- a. *Community activation*, aktivasi dan mobilisasi masyarakat dianggap sebagai hal yang paling penting. Sebuah tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan mengaktifkan orang, membuat anggota masyarakat tertarik dan mau berpartisipasi, melibatkan dan melibatkan pemangku kepentingan, menemukan dan memotivasi pemimpin baru, menciptakan dan mendorong jaringan baru, dan juga memulai dan menyadarkan suatu kelompok masyarakat baru dinilai penting bagi masyarakat untuk diberdayakan.
- b. *Community competence empowerment*, sebuah aktifitas pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Seperti meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu hal tertentu, mendistribusikan pengetahuan hingga keterampilan praktis yang membawa masyarakat kedalam kemandirian.
- c. *Management skills development*, keterampilan manajemen telah menjadi fokus yang konsisten sebagai kegiatan penting untuk memperluas pemberdayaan masyarakat sejak awal program. Beberapa keterampilan manajemen dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pengajaran manajemen program dan keterampilan membangun tim, pelatihan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dan meningkatkan kemampuan dan keahlian kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi, memecahkan dan mengelola masalah mereka.
- d. *Creation of a supportive environment*, penciptaan lingkungan yang mendukung penting untuk memperluas pemberdayaan masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan. Seperti mengembangkan keterampilan

lobbying anggota masyarakat, mengadvokasi dukungan atau sumber keuangan, mempromosikan akses yang lebih baik ke berbagai instansi dan sumber daya lain yang mendukung, meningkatkan kemampuan peserta untuk mempertahankan dan mempertahankan dukungan sosial yang lebih luas.

5. Upaya Pemberdayaan

Menurut Kartasasmita dalam Zubaedi (2013) upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah:

a. Memungkinkan potensi (*Enabling*)

Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap manusia atau masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan potensi-potensi yang telah dimiliki.

b. Memperkuat potensi (*Empowering*)

Memperkuat potensi-potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Langkah pemberdayaan dilakukan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas suatu masyarakat.

c. Melindungi masyarakat (*Protection*)

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksplorasi yang kuat

terhadap yang lemah. Melalui keberpihakan atau adanya aturan- aturan kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Merujuk pada pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

b. Partisipatif

Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat harus terlibat secara aktif. Masyarakat terlibat agar mendapatkan arahan dari pendamping untuk memotivasi dan mengembangkan dirinya sesuai kemampuan yang dimiliki agar mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya.

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat material. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuh kembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.2.2 Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka. memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. (Buku Kerja Pendamping PKH, 2009:1). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan” menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah

oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut Purwanto (2013), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Peserta Program Keluarga Harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi beberapa kriteria program, yaitu memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (pedoman PKH 2012). Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen yaitu antara lain:

- a. Pendidikan Menurut Pasal 49 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- b. Kesehatan Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang “Kesehatan”, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis.

c. Kesejahteraan Sosial Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta Kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

3. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Penerima bantuan PKH yang selanjutnya disebut peserta PKH adalah RTSM/KSM yang berdomisili di lokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria:

- a. Memiliki anak SD/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat.
- b. Memiliki anak SMP/Madrasah Tsanawiyah/ sederajat. 17
- c. Memiliki anak usia 7-18 tahun yang belum menamatkan pendidikan dasar.
- d. Memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas,

- e. Memiliki anak balita.
 - f. Memiliki anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah).
4. Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
- a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. pendampingan PKH;
 - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
5. Kewajiban Program Keluarga Harapan

Calon penerima bantuan terpilih wajib menandatangani persetujuan ada formulir validasi untuk memenuhi ketentuan PKH (sesuai yang tercantum dalam pedoman umum) sebagai berikut:

- a. Memeriksa kandungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
- b. Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
- c. Mengantar anak usia 0-5 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
- d. Mengantarkan anak usia lebih kecil dari 7 tahun yang belum sekolah ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- e. Mendaftarkan dan menyekolahkan anak usia 7-15 tahun serta anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun

2.2.3 Kajian tentang Kewirausahaan Sosial

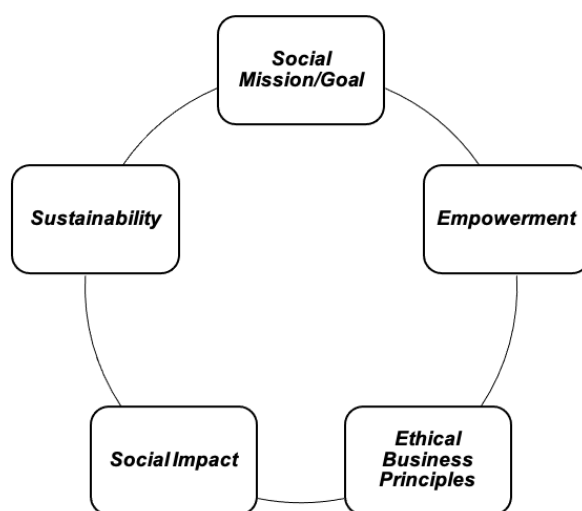
1. Pengertian Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial. Solusi yang diharapkan adalah terjadinya perubahan sosial kearah yang lebih baik atau positif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kewirausahaan menurut Dhewanto (2013) menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh individu dengan ide-ide kreatif untuk memaksimalkan keuntungannya. Orang yang menjalankan hal ini disebut dengan pengusaha. Seorang pengusaha dipandang sebagai individu yang dapat melihat peluang dengan membayangkan kondisi yang lebih baik yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga membuat maju bisnisnya. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kewirausahaan sosial.

Menurut Nichols (Wibowo & Nulhaqim, 2015) kewirausahaan sosial adalah aktivitas yang efektif dan inovatif yang secara strategis berfokus pada usaha mengatasi kegagalan pasar sosial dan penciptaan peluang-peluang baru untuk meningkatkan nilai sosial secara sistematis menggunakan sumber daya dan beragam format organisasi untuk memaksimalkan dampak sosial serta membawa perubahan, sedangkan Peter Drucker (Dhewanto, 2013) mendefinisikan kewirausahaan dengan memfokuskan peluang dimana seorang Drucker melihat wirausaha sebagai pelaku ekonomi yang memanfaatkan dan menciptakan peluang dalam perubahan yang terjadi di masyarakat seperti teknologi, preferensi konsumen, dan norma-norma sosial. Seorang wirausaha selalu mencari perubahan, merespon, dan memanfaatkan permasalahan yang ada sebagai peluang. Oleh karena

itu, kewirausahaan sosial adalah proses untuk mengenali dan memanfaatkan peluang permasalahan sosial untuk menciptakan nilai sosial. Definisi kewirausahaan sosial yang lebih komprehensif adalah sebuah penciptaan nilai sosial yang dihasilkan melalui kolaborasi antara sekelompok orang dan organisasi dalam sebuah masyarakat yang sedang terlibat atau melaksanakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan inovasi sosial (Hulgard, 2010).

2. Aspek Kewirausahaan Sosial



Gambar 2.1 Aspek Kewirausahaan

Menurut (Haryanti et al., 2016) terdapat 5 aspek *social enterprise* yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kewirausahaan sosial di Indonesia, antara lain *social mission/goal*, *empowerment*, *ethical business principles*, *social impact*, dan *sustainability*.

- a. *Social Mission/Goal*. Tujuan dari pelaksanaan kewirausahaan sosial adalah menuntaskan masalah sosial yang ada atau bisa dikatakan sebagai *social mission*. Ini merupakan sebuah latar belakang dari pendirian sekaligus tujuan bagi sebuah *social enterprise* untuk terus ada di tengah masyarakat.

- b. *Empowerment*. Masyarakat yang memiliki masalah sosial secara langsung maupun tidak langsung diedukasi dan didorong untuk ikut membantu diri mereka sendiri hingga mandiri dengan terlibat dalam proses penyelesaian masalah sosial tersebut. Hal ini menjadi kekuatan yang berkelanjutan dalam pemecahan masalah sosial.
- c. *Ethical Business Principles*. Pelaksanaan kewirausahaan sosial wajib menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya, seperti bertanggung jawab kepada konsumen, karyawan, stakeholders, masyarakat, dan lingkungan sekitar sehingga hal tersebut berdampak baik tidak hanya kepada bisnis itu sendiri namun juga dapat menciptakan perluasan dampak sosial.
- d. *Social Impact*. Tujuan utama dari sebuah kewirausahaan sosial adalah untuk membantu sesama secara mandiri dan berkelanjutan melalui kegiatan bisnis. Jadi, dampak sosial juga merupakan suatu tujuan utama yang perlu dicapai, selain target bisnis pada umumnya seperti pertumbuhan perusahaan dan profit.
- e. *Sustainability*. Keberlanjutan sebuah kewirausahaan sosial sangat penting dalam penciptaan dampak sosial yang *massive* dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Sehingga, perlu adanya orientasi jangka panjang dan berkelanjutan dari sebuah inisiatif kewirausahaan sosial

Hulgard (2010) memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama yakni *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*.

- a. *Social Value*. Penciptaan nilai sosial merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yaitu bagaimana menciptakan manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. *Civil Society*. Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.
- c. *Innovation*. Tujuan dari kewirausahaan sosial adalah memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
- d. *Economic Activity*. Pelaksanaan kewirausahaan sosial yang berhasil dan berkelanjutan pada umumnya diimplementasikan dengan cara menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Penciptaan *economic opportunity* ini dapat dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan masyarakat dan organisasi itu sendiri.

2.2.4 Kajian Tentang Pekerja Sosial

1. Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial menurut Siporin dalam Adi Fahrudin (2014) didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka yang tengah dihadapi, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Keberfungsian sosial merupakan upaya agar individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dapat melakukan perannya serta dapat mengaktualisasikan diri

“Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (*social functioning*).” (Suharto, 2009)

2. Teknik Pemberdayaan

Dubois dan Miley dalam Suharto (2009) memberi cara atau teknik yang spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien (*client partnership*)
- b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, memepertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga kerahasiaan.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan, penerjemah kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu

publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

3. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan dalam pekerjaan sosial dibagi menjadi tiga aras atau matra pemberdayaan menurut Suharto (2009) antara lain sebagai berikut.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

4. Tugas Pekerja Sosial

Schwartz dalam Suharto (2009) mengemukakan tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial:

- a. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
- b. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
- c. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
- d. Membagi visi kepada masyarakat. Harapan dan aspirasi pekerjaan sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
- e. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerjaan sosial masyarakat dibentuk.

2.2.5 Kajian Tentang Peningkatan Kapasitas

1. Pengertian Peningkatan Kapasitas

Secara alami, organisasi selalu berupaya mencapai tujuan mereka, mewujudkan visi dan misi melalui program-program jangka pendek, menengah, dan panjang, dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut, organisasi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada dalam jalur mencapai visi dan misinya, dan bahkan lebih penting lagi, untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu

cara untuk menghadapi perubahan ini sesuai dengan tuntutan zaman adalah melalui pembangunan kapasitas.

Menurut Millen (2012:19), kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Millen juga menganggap bahwa peningkatan kapasitas merupakan tugas yang spesifik karena berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat dinyatakan bahwa peningkatan kapasitas merupakan suatu proses atau kegiatan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau sistem agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Tujuan dari peningkatan kapasitas adalah untuk memastikan bahwa entitas tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, perubahan lingkungan baik dari luar maupun dalam menjadi tuntutan yang memaksa organisasi untuk secara berkesinambungan mengambil sikap yang sesuai untuk menghadapi tantangan yang dapat mengancam eksistensinya. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkuat adaptasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Peningkatan Kapasitas

Adapun tujuan dari peningkatan kapasitas kapasitas dapat dijelaskan dalam dua bagian seperti yang dikemukakan oleh Keban (2008) adalah:

- a. Secara umum, tujuannya adalah untuk mencapai sustainabilitas (keberlanjutan) dalam suatu sistem.

b. Secara khusus, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dengan memperhatikan aspek berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi dalam menggunakan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 2) Meningkatkan efektivitas melalui usaha yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Meningkatkan responsifitas dengan menyelaraskan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada kinerja individu, kelompok, organisasi, dan sistem secara keseluruhan.

3. Karakteristik Peningkatan Kapasitas

Gandara (2008) menyebutkan peningkatan kapasitas memiliki karakteristik sebagai berikut:

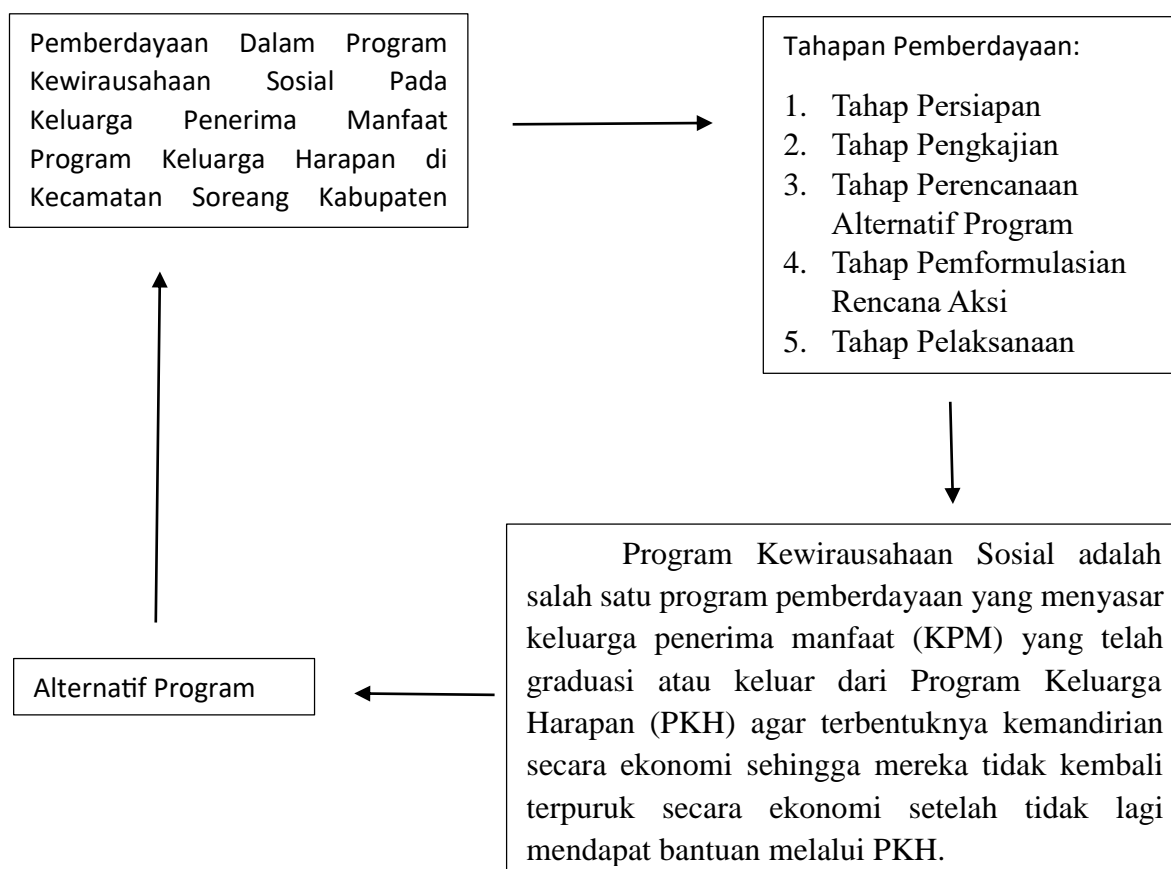
- a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.
- b. Memiliki esesensi sebagai sebuah proses internal.
- c. Dibangun dari potensi yang telah ada.
- d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri.
- e. Mengurus masalah perubahan.
- f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistic

Dari indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa Peningkatan Kapasitas adalah suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya ditujukan untuk mencapai hasil akhir semata. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Peningkatan Kapasitas adalah suatu proses pembelajaran

yang terus berlanjut agar organisasi atau sistem dapat tetap eksis dan bertahan menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

2.2.6 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir